

## BAB II

### PACIFIC ELEVATION DAN SIKAP NEGARA-NEGARA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN TERHADAP GERAKAN SEPARATIS PAPUA BARAT

#### 2.1. Gerakan Separatis Papua Barat

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, terdapat prosesi penyerahan kedaulatan (*souvereiniteitoverdracht*) oleh Belanda sebagai bangsa penjajah kepada Indonesia. Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) pihak Belanda, Indonesia, dan *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO) bertemu untuk membahas penyerahan kedaulatan kepada Indonesia. BFO atau *Federal Consultative Assembly* merupakan komite yang terdiri dari lima belas pemimpin negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat yang merupakan negara boneka buatan Belanda. Konferensi yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 menghasilkan tiga poin, salah satu poinnya adalah Nugini Barat untuk sementara tetap berada di bawah pemerintahan Belanda dan penentuan status wilayah tersebut akan ditentukan melalui negosiasi mendatang (Vandenbosch, 1950, p.1). Hal tersebut dikarenakan Indonesia dan Belanda tidak mencapai titik temu yang mengakibatkan wilayah Nugini Barat atau Papua Barat ditentukan dalam waktu mendatang.

Setelah 12 tahun berselang, negosiasi untuk membahas status Papua Barat tidak dikunjungi dibahas. Hal tersebut dikarenakan Belanda menginginkan Papua Barat dijadikan sebagai negara boneka (Tirto, 2021). Keseriusan Belanda menjadikan Papua sebagai negara bonekanya dengan terbentuknya Komite Nasional Papua pada 19 Oktober 1961. Selain itu Belanda mulai melakukan pendekatan terhadap masyarakat Papua untuk membantu memperkuat pertahanan, melalui *Papoea Vrijwilligers Corps* atau Korps Relawan Papua yang telah direncanakan sejak tahun 1950 namun pada tahun 1960 dipercepat (Drooglever, 2010, p.409). buku yang dirilis oleh Departemen Penerangan Republik Indonesia, inisiatif Belanda untuk menjadikan Papua sebagai negara boneka diwujudkan dengan memperkuat pertahanan di Papua dengan mengirimkan kapal induk Karel Doorman dan pasukan pada bulan Mei 1960 (Mulyadi, 2021, p.269).

Dengan usaha-usaha yang Belanda lakukan untuk menjadikan Papua sebagai negara boneka, Indonesia tidak tinggal diam, Presiden Ir. Soekarno memperkuat kekuatan militer dengan dibentuknya Korps Tentara Kora-1 pada 6 Maret 1961 dengan Mayor Jendeal Soeharto

sebagai panglima komando. Di tahun yang sama pada tanggal 11 Desember 1961, pemerintah Indonesia membentuk Dewan Pertahanan Nasional (Depertan), tiga hari kemudian dilaksanakan sidang yang melahirkan Komando Operasi Tertinggi (KOTI) yang dipimpin langsung oleh Presiden Ir. Soekarno. Hingga akhirnya, pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Ir. Soekarno menyampaikan pidato di hadapan masyarakat di alun-alun utara Yogyakarta sebagai berikut (Tirto, 2018) :

“Batalkan ‘negara Papua’ itu! Kibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat! Gagalkan! Kibarkan bendera kita! Siap sedialah, akan datang mobilisasi umum! Mobilisasi umum bagi yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialis Belanda!”

Isi pidato tersebut ditangkap oleh masyarakat Indonesia sebagai tiga poin utama yang kemudian disebut sebagai Tri Komando Rakyat (Trikorra). Tiga poin penting dalam Trikorra antara lain yang pertama adalah gagalkan negara boneka Papua, yang kedua adalah kibarkan bendera Sang Saka Merah Putih di Papua, dan yang ketiga adalah siapkan diri untuk mobilisasi umum.

Indonesia mengerahkan segala kemampuan militer yang dimiliki untuk kembali merebut Papua dari kekuasaan Belanda. Namun Amerika Serikat menyarankan Indonesia untuk menggunakan jalur diplomasi dalam menyelesaikan perseteruan status Papua Barat. Pada 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda kembali bertemu dengan Amerika Serikat menjadi ‘penengah’ yang akhirnya melahirkan Perjanjian New York. Dalam perjanjian tersebut menyepakati bahwa Belanda harus menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia melalui badan yang dibentuk oleh PBB yaitu *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) paling lambat pada 1 Mei 1963 (UN, 1962). Dalam perjanjian tersebut dinyatakan adanya kesempatan untuk melaksanakan kebebasan memilih disertai adanya konsultasi dengan dewan perwakilan di masyarakat Papua terkait prosedur dan metode yang akan digunakan dengan tujuan untuk memastikan keinginan penduduk yang diungkapkan secara bebas (Saltford, 2000, pp.74-81). Pada tahun 1968, PBB melalui perwakilannya mengunjungi Indonesia untuk melihat situasi di Papua, dengan tujuan untuk membantu, menasehati, serta berpartisipasi. Indonesia menolak gagasan diadakannya penentuan nasib sendiri oleh rakyat Papua menggunakan sistem yang diakui internasional, *one man one vote*, namun lebih memilih menggunakan musyawarah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pembangunan penduduk yang terlihat secara jelas (Saltford, 2000, pp.74-81). Pada 14 Juli 1969, Indonesia melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diwakili oleh masyarakat asli Papua

yang dipilih pemerintah sebagai kepala suku. PBB menerima 179 petisi dan lebih dari setengahnya memilih untuk bersama Indonesia (Saltford, 2000, pp.74-81).

Masyarakat Papua menilai tidak dilibatkan dalam pembuatan Perjanjian New York dan tidak seluruh masyarakat Papua ikut andil dalam Pepera yang dilaksanakan sebagai wujud terintegrasinya Papua dengan Negara Indonesia (Diplomat, 2019). Dengan demikian timbul konflik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ingin Papua menjadi negara merdeka dan lepas dari Indonesia. Dalam buku *Road Map Papua*, terdapat empat isu yang menjadi sumber terjadinya konflik di Papua (Muridan S. Widjojo, 2008, p.2). Isu pertama adalah marginalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua sebagai akibat dari pembangunan ekonomi, kebijakan budaya, migrasi massal ke Papua dari tahun 1970. Isu kedua adalah gagalnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Isu ketiga adalah adanya perbedaan mengenai pandangan antara Jakarta dan Papua mengenai sejarah integrasi dan konstruksi identitas politik Papua. Isu keempat adalah pengalaman sejarah dimana adanya kekerasan terhadap masyarakat asli Papua oleh aktor negara terhadap Warga Negara Indonesia di Papua.

Dengan permasalahan yang mengakar tersebut, muncul kelompok-kelompok yang berjuang untuk lepas dari Indonesia. Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah organisasi yang mewadahi gerakan pro-kemerdekaan Papua yang terbentuk tahun 1965. Rumkorem menjadi presiden pertama dari pemerintahan sementara Papua Barat, dan mulai memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 1 Juli 1971, hari itu menjadi hari yang dipercaya oleh masyarakat yang mendukung kemerdekaan Papua sebagai lahirnya OPM (Osborne, 1985, pp. 55-56). Organisasi ini terdiri dari tiga bagian (IPAC, 2015, pp. 1-6) antara lain yang pertama adalah kelompok unit bersenjata yang berbeda-beda. Kelompok ini terbagi sesuai dengan kontrol teritorial yang terbatas dan tidak memiliki tanggung jawab kepada satu komandan. Yang kedua adalah kelompok di Papua itu sendiri yang terdiri masyarakat Papua yang melakukan protes dan demonstrasi. Demonstrasi dilakukan untuk tujuan menyuarakan ketidakadilan dan kebencian terhadap pemerintah Indonesia. Yang ketiga adalah kelompok kecil pemimpin yang berbasis di luar negeri, antara lain di Pasifik, Eropa, dan Amerika Serikat. Kelompok ini berusaha melakukan internasionalisasi isu kemerdekaan Papua dengan tujuan mendapatkan dukungan dari dunia internasional. Dengan adanya pembagian kelompok tersebut, terdapat dua kelompok yang berbeda yakni antara kelompok politik dan kelompok bersenjata. Namun kedua kelompok tersebut sulit diintegrasikan dikarenakan kombinasi berbagai macam suku, loyalitas etnis, perbedaan kelas yang mencolok, permusuhan antar individu, dan medan yang terpencil (IPAC, 2015, pp. 1-6).

Gerakan separatis mulai dilancarkan OPM melalui kelompok bersenjata yang setidaknya tersebar di seluruh wilayah Papua. Kelompok bersenjata ini tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang tersebar di beberapa wilayah antara lain Timika, dataran tinggi, dan pantai utara yang berseberangan langsung dengan Papua Nugini. Serangan pertama kali dilancarkan di daerah sekitar tambang emas dan tembaga Grasberd di distrik Mimika, yang dioperasikan oleh perusahaan Amerika Serikat, *Freeport McMoran*. Aktivitas penambangan dimulai pada tahun 1973 dan menjadi daya pikat TPNPB-OPM untuk melancarkan aksinya dikarenakan kawasan tersebut merupakan perusahaan multinasional asing yang beroperasi di tanah adat, memiliki pendapatan yang besar, dan dijaga oleh pasukan keamanan negara (IPAC, 2015, pp. 1-6). Laporan kepolisian menyatakan bahwa antara tahun 2009 hingga 2014, terdapat 166 kasus kekerasan yang melibatkan OPM, setidaknya terdapat 14 serangan terhadap aparat keamanan di tahun 2014 hingga 2015 (Diplomat, 2015).

Di lain sisi, kelompok-kelompok politik melakukan perjuangan mencapai kemerdekaan dengan meningkatkan isu kemerdekaan di dalam negeri. Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dibentuk oleh beberapa organisasi non-profit di Papua pada 19 November 2008. Setahun setelah terbentuk, tepatnya Maret 2009, KNPB melakukan aksi demonstrasi pertama di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dengan tuntutan untuk menarik pasukan militer Indonesia dari Papua. “Militer harus secepatnya ditarik dari Tanah Papua” ujar Ketua KNPB Victor F, Yeimo (AntaraNews, 2009). Demonstrasi dilakukan dengan tujuan untuk memprovokasi pihak keamanan untuk melakukan kekerasan terhadap para demonstran yang nantinya memicu respon internasional atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat aksi provokasi tersebut (IPAC, 2015, pp. 1-6). Hal tersebut dilakukan dengan melihat peristiwa Timor Timur pada tahun 1991, dimana terdapat perselisihan aparat keamanan dengan masyarakat, yang kemudian Timor timur berhasil lepas dari Indonesia dengan bukti pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah.

Usaha untuk menggaungkan isu kemerdekaan Papua tidak hanya dilakukan di Papua, namun melalui kelompok politik berusaha untuk melakukan internasionalisasi isu di dunia internasional. Kelompok politik tersebut antara lain adalah *West Papua National Authority* (WPNA) yang dibentuk pada tahun 2004 dan memfokuskan untuk mendapat pengakuan internasional atas kedaulatan negara Papua yang mereka yakini yakni Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB). Kemudian terdapat *West Papua National Council for Liberation* (WPNCL) yang terbentuk pada tahun 2005 di Vanuatu dengan tujuan mendapat pengakuan dari negara-negara di kawasan Kepulauan Pasifik. Usaha tersebut dilakukan dengan ikut

bergabung dalam organisasi Pasifik yakni MSG, namun pengajuan menjadi anggota ditolak dikarenakan tidak cukup untuk merepresentasikan masyarakat di Papua (MSG, 2014).

Pada akhirnya WPNCL, NRFPB dan KNPB menjadi satu dalam satu payung organisasi yang disebut sebagai *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP). Organisasi yang dibentuk pada 7 Desember 2014 tersebut mulai mencari dukungan terhadap kemerdekaan Papua di dunia internasional. Pada tahun 2015, ULMWP diterima menjadi anggota *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dengan status *observer member*. Hal ini menjadi pengakuan diplomatik pertama Papua Barat sejak 1963 dan diakui sebagai “*country in waiting*” (ULMWP, 2020). Tidak cukup di kawasan Pasifik, pemimpin ULMWP, Benny Wenda mulai melebarkan sayapnya untuk mencari dukungan terhadap pengakuan kemerdekaan di Papua. Pada 3 Mei 2016, di Gedung Parlemen, London, Inggris, pejabat dan politikus dari berbagai negara turut hadir menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua Barat dengan ditanda tangannya *Westminster Declaration*, antara lain terdiri dari Perdana Menteri Tonga dan Kepulauan Solomon, Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehutanan Vanuatu, Menteri pendidikan Guyana, perwakilan Parlemen Inggris, perwakilan Parlemen Australia, politikus Selandia Baru, politikus Papua Nugini.

## **2.2 Sikap Negara-Negara di Kawasan Pasifik Selatan**

Dalam usaha mendapat dukungan internasional terkait kemerdekaan Papua, kelompok-kelompok separatis mulai mendekati diri kepada negara-negara yang terletak berdekatan dengan Papua. Kawasan Pasifik Selatan memiliki letak geografis yang berseberangan langsung dengan Indonesia yakni Papua dengan Papua Nugini. Selain aspek geografis, masyarakat Papua juga memiliki kesamaan ras dengan masyarakat di negara kawasan Pasifik Selatan yaitu ras Melanesia. Mela yang berarti *black* dan nasia berarti *nation*, dalam hal ini masyarakat Melanesia adalah masyarakat kulit hitam. Ras Melanesia tersebar di beberapa negara antara lain Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Kaledonia Baru, Fiji, dan Aborigin (Australia). Mayoritas negara-negara di kawasan Pasifik Selatan merupakan negara bekas wilayah koloni negara lain seperti Inggris, Perancis, dan Australia. Dengan adanya usaha untuk keluar dari pendudukan kolonial, negara-negara di Pasifik Selatan memiliki sebuah semangat anti-kolonialisme yang disebut sebagai “*The Melanesian Way*”

*The Melanesian Way* digagas oleh filsuf kelahiran Papua Nugini, Bernard Narokobi, pada tahun 1970-an yang menuliskan prinsip-prinsip masyarakat Melanesia dalam 17 lembar halaman dan ditulis dalam surat kabar yang disebar di seluruh negara-negara Melanesia. *The Melanesian Way* bertujuan untuk meningkatkan semangat anti-kolonialisme untuk masyarakat

Melanesia agar terbebas dari kolonialisme. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa negara di kawasan Pasifik Selatan meraih kemerdekaannya antara lain adalah Fiji pada tahun 1970, Papua Nugini pada tahun 1975, Kepulauan Solomon pada tahun 1978, dan Vanuatu pada tahun 1980. Dengan semangat itu negara-negara Melanesia berhasil meraih kemerdekaannya dan membebaskan diri dari kolonialisme (Bayuseno & Windiani, 2020, p. 210). Semangat tersebut tertuang dalam salah satu penggalan tulisannya, “as melanesians, we are spiritual people. even before the christians came onto our shores, we felt and knew the forces of a source greater than ourselves, that was our divine power, the melanesian way” (Narokobi, 1980, p. 6). Dengan semangat *Melanesian Way*, negara-negara di Pasifik Selatan turut mendukung kemerdekaan Papua dari sikap kolonialisme yang dilakukan Indonesia. Namun yang menjadi sorotan adalah tidak semua negara-negara Melanesia di kawasan Pasifik Selatan mendukung kemerdekaan Papua dan condong mendukung Indonesia atas kedaulatan wilayahnya. Hal tersebut membuat jalan organisasi kemerdekaan Papua baik OPM dan ULMWP menempuh jalan yang terjal akibat minimnya dukungan dari negara Pasifik Selatan.

### **2.2.1 Vanuatu**

Vanuatu adalah negara kepulauan yang terletak di kawasan Pasifik Selatan yang memiliki 83 pulau. Negara ini memiliki luas wilayah 12 ribu kilometer persegi dengan jumlah penduduk 292.680 jiwa yang terhitung sejak tahun 2018. Vanuatu mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1980 setelah sebelumnya dibawah kendali koloni Perancis dan Inggris. Kedua negara tersebut memberi pengaruh besar bagi sistem politik domestik di Vanuatu, hal tersebut yang menjadikan sistem pemerintahan yang dianut Vanuatu adalah Republik Parlemitter. Dalam sistem pemerintahan ini Presiden sebagai kepala negara sedangkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Selain sebagai kepala negara, Presiden menjadi simbol pemerintahan dan tidak memiliki kekuasaan apapun, sedangkan Perdana Menteri memiliki wewenang untuk menjalankan jalannya pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan, Perdana Menteri menjadi pemimpin di Parlemen Vanuatu yang menganut sistem unikameral. Jumlah anggota Parlemen terdiri dari 52 anggota yang dipilih empat tahun sekali. Anggota parlemen terdiri dari partai-partai yang terdapat di Vanuatu, namun terdapat satu partai yang mendominasi politik domestik di Vanuatu yaitu Vanua'aku Pati (VP).

Partai VP mulai terbentuk pada tahun 1971 dengan nama *New Hebrides National Party* (NHNP) yang kemudian merubah namanya menjadi Vanua'ku Pati pada tahun 1977. Sejak terbentuknya, partai ini telah mendominasi politik domestik di Vanuatu dalam 15 tahun selama 24 tahun terakhir. VP dalam berpolitik memiliki visi mengembalikan tanah yang terasing,

pengembangan Vanuatu, serta menghormati *Kastom* atau yang disebut adat isitadar, dimana hal tersebut sejalan dengan apa yang pemerintah Vanuatu lakukan (Morgan, 2008, p. 121). Dalam menjalankan politiknya, VP menganut paham Sosialisme Melanesia dengan menekankan prinsip-prinsip seperti komunalisme, kepedulian terhadap sesama, dan saling berbagi, dimana hal tersebut merupakan turunan dari *Melanesian Way* yang digagas oleh Bernard Narokobi (Temaluru, 2016, pp. 574-581). Prinsip tersebut pada dasarnya merupakan cermin asli dari masyarakat Vanuatu dalam bermasyarakat yang menerapkan nilai-nilai komunalisme dan menjunjung nilai kemanusiaan. Prinsip Sosialisme Melanesia tersebut berpengaruh dalam politik domestik Vanuatu yang ditekankan oleh Perdana Menteri pertama Vanuatu, Walter Lini, yang berasal dari partai VP, dengan demikian pembuatan kebijakan serta pengambilan keputusan dipengaruhi oleh prinsip tersebut. Hal tersebut tercermin dalam perumusan kebijakan luar negeri yang dibentuk oleh partai ini dimana salah satunya upaya dekolonisasi bagi masyarakat yang masih dibawah kolonialisme yakni Papua Barat dan Kaledonia Baru (Morgan, 2008, p. 121).

Vanuatu memiliki identitas yang dibentuk di dalam masyarakatnya hingga seluruh masyarakat Melanesia. Identitas tersebut disebut sebagai *Melanesia Renaissance* yang memiliki arti dekolonisasi bagi wilayah Melanesia yang belum mendapatkan kemerdekaannya. *Melanesia Renaissance* merupakan ikatan yang memperkuat kohesivitas etnis dan hubungan emosional antara Vanuatu dengan Papua (Temaluru, 2016, pp. 574-581). Ikatan tersebut yang membuat Vanuatu mendukung kemerdekaan penuh terhadap Papua. Pada tahun 2010, Parlemen Vanuatu mengadopsi Rancangan Undang-Undang atau yang disebut *Wantok Blong Yumi Bill* yang menegaskan dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua dari Indonesia (CNN, 2019). Kepala Pemerintahan, Hon. Eduard Natape MP dan pemimpin oposisi, Hon. Maxime Carlot Korman MP mensponsori mosi di Parlemen untuk mendeklarasikan kebijakan luar negeri Vanuatu mengenai Papua Barat. Rancangan Undang-Undang tersebut pertama kali diinisiasi oleh Anggota Independen, Hon. Ralph Regenvanu MP, yang mengajukan petisi dari masyarakat Vanuatu yang disebut *Petition of the People of Vanuatu*. Petisi tersebut terdiri dari delapan poin (Scoop, 2010) antara lain yang pertama mengesahkan mosi di Parlemen nasional yang menyatakan kebijakan luar negeri Vanuatu untuk mendukung kemerdekaan Papua. Yang kedua dan ketiga mendorong Vanuatu untuk memberikan status *observer member* pada perwakilan Papua di MSG dan PIF. Yang keempat mensponsori resolusi di forum internasional untuk pencarian fakta atas pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Yang kelima menjadi perwakilan negara di *International Court of Justice* dalam membuktikan legalitas Perpera. Yang keenam mengembalikan kembali status Papua di PBB sebagai *non-self-governing*

*territories*. Yang ketujuh memfasilitasi upaya advokasi internasional di Departemen Luar Negeri Vanuatu. Yang kedelapan meratifikasi Konvensi PBB berkaitan dengan status pengungsi untuk membuka jalan Vanuatu dalam mendukung perjuangan rakyat Papua. Dukungan juga diberikan kepada organisasi-organisasi pro-kemerdekaan Papua, pada tahun 1985, Perdana Menteri Vanuatu, Barak Maautamate Sope, mengundang dua pemimpin utama OPM, Jacob Prai dan Theys Elluay ke Vanuatu untuk menandatangani nota kesepahaman untuk bekerja sama (Post, 2018). Dukungan juga diberikan oleh Perdana Menteri Vanuatu, Moana Kalosil Carcasses, terhadap organisasi pro-kemerdekaan Papua, WPNCL untuk mendapatkan keanggotaan penuh di organisasi MSG (ABC, 2014). Pada 7 Desember 2014, Vanuatu menjadi tuan rumah terbentuknya organisasi pro-kemerdekaan, ULMWP, di ibu kota Vanuatu, Port Vila (ULMWP, 2020).

Vanuatu turut mencari dukungan kepada negara lain hingga organisasi internasional untuk turut mendukung kemerdekaan Papua. Maka dari itu, isu kemerdekaan Papua mulai digaungkan di berbagai forum, baik di regional maupun internasional. Di dalam forum regional, Vanuatu di kawasan Pasifik Selatan menjadi salah satu negara yang menginisiasi terbentuknya organisasi antar negara Melanesia yang disebut Melanesian Spearhead Group (MSG). MSG dibentuk sebagai upaya dekolonisasi terhadap negara di Pasifik Selatan agar dapat merasakan kemerdekaan penuh. Vanuatu mendorong agar ULMWP mendapatkan keanggotaan penuh di MSG, hal itu sebagai cara agar negara anggota MSG ikut mendukung kemerdekaan Papua. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-20 MSG, ULMWP mendapatkan status sebagai *observer member* dan sebagai organisasi non pemerintah (Kemlu, 2019). Pada saat yang bersamaan Indonesia mendapatkan status sebagai *associate member* di MSG dengan faktor Indonesia mewakili masyarakat Melanesia yang tersebar di lima pulau di Indonesia Timur antara lain Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Sebelumnya Indonesia telah mendapat status sebagai *observer member* di MSG pada tahun 2011. Bergabungnya Indonesia dalam MSG, dibantu oleh Perdana Menteri Vanuatu, Sato Kilman, dengan menerima undangan Indonesia ke Jakarta untuk pembahasan hubungan diplomatik antar kedua negara, pemberian bantuan langsung berupa seragam polisi untuk kepolisian Vanuatu (Elmslie, 2015, p.100). Sikap Kilman yang sangat dekat dengan Indonesia banyak ditentang oleh Parlemen Vanuatu, pada 21 Maret 2013, Kilman mendapat mosi tidak percaya oleh kelompok oposisi Parlemen Vanuatu sejumlah 33 suara dari 51 anggota Parlemen (ABC, 2013). Dukungan terhadap kemerdekaan Papua telah melekat bagi masyarakat Vanuatu baik masyarakat desa hingga para elit, hal itu disebabkan kehadiran aktivits Papua Barat di Vanuatu dan melancarkan propaganda melalui surat kabar dan media lokal Vanuatu, dengan

demikian isu Papua Barat sangat melekat dengan agenda politik dalam negeri hingga berpengaruh pada jiwa nasional masyarakat Vanuatu (Elmslie, 2015, p.100)

Di dalam forum internasional, Vanuatu menyuarakan isu kemerdekaan Papua melalui Forum di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA). Isu kemerdekaan Papua disuarakan oleh Vanuatu pertama kali di UNGA ke-68 pada 28 September 2013 oleh Perdana Menteri Vanuatu Moana Carcasses Kalosil, mengenai tidak terpenuhinya hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri bagi masyarakat Papua Barat (The Republic of Vanuatu Statement for The United Nations, 2013). Vanuatu kembali menyuarakan isu kemerdekaan Papua di UNGA ke-72 pada 21 September 2017 oleh Perdana Menteri Enele Sosene Sopoaga, mengenai kekerasan serta tidak dipenuhinya hak asasi manusia masyarakat Papua (The Republic of Vanuatu Statement for United Nations, 2017). Indonesia menyikapi pernyataan Vanuatu tersebut melalui Sekretaris III Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB, Ainan Nuran, yang menyatakan bahwa Papua dan Papua Barat adalah bagian dari kesatuan dan kedaulatan Indonesia, negara-negara itu (Vanuatu) sudah tertipu oleh individu yang membawa agenda separatis yang mengeksploitasi isu hak asasi manusia (Indonesia - 1st Right of Reply, 2017).

Pada 28 September 2018, dalam UNGA ke-73 melalui Perdana Menteri Charlot Salwai Tabimasmal, Vanuatu kembali menggaungkan isu kemerdekaan Papua terutama mengenai adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dialami masyarakat Papua (The Republic of Vanuatu Statement for The United Nations, 2018). Pada tahun berikutnya yakni 27 September 2019, Perdana Menteri Charlot Salwai Tabimasmal kembali menyuarakan isu kemerdekaan Papua di UNGA ke-74, dengan isu pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat Papua (The Republic of Vanuatu Statement for The United Nations, 2019). Indonesia menyikapi pernyataan Vanuatu tersebut melalui diplomat Indonesia, Rayyanul Sangadji, yang menyatakan bahwa Vanuatu tidak mempedulikan hak asasi manusia namun hanya mendukung separatisme dengan provokatif (Indonesia - 1st Right of Reply, 2019).

Isu kemerdekaan Papua kembali disuarakan saat UNGA ke-75 pada 26 September 2020 oleh Perdana Menteri Bob Loughman, yang menyatakan Indonesia telah melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh masyarakat Papua (The Republic of Vanuatu Statement for United Nations, 2020). Indonesia menggunakan hak jawabnya untuk menyikapi pernyataan Vanuatu tersebut melalui Sekretaris II Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB, Silvany Austin Pasaribu, yang menyatakan bahwa Vanuatu bukan merupakan representasi dari masyarakat Papua serta menekankan pembangunan yang telah dilakukan Indonesia di Papua (Indonesia - 1st Right of Reply, 2020).

Tidak hanya melalui forum UNGA, Vanuatu kerap kali menyuarkan isu pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat Papua di *United Nations Human Rights Council* (UNHRC). Dalam sidang *Human Rights Council* ke-25, pada 28 Maret 2014, Vanuatu menyampaikan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat Papua melalui Perdana Menteri Moana Carcasses Kalosil (The Republic of Vanuatu Statement for The United Nations, 2014). Indonesia menyikapi hal tersebut melalui perwakilan Indonesia di UNHRC yang menyatakan bahwa terdapat kontradiksi atas pernyataan Vanuatu yang sebelumnya pada tahun 2011 melalui *Bilateral Development Cooperation Agreement*, kedua negara sepakat untuk menghormati masing-masing kedaulatan nasional, serta Indonesia menyatakan bahwa pembangunan yang sebenarnya telah berlangsung di Papua (Human Rights Council Twenty-fifth session, 2014). Hal yang sama kembali dilakukan oleh Vanuatu dalam sidang *Human Rights Council* ke-34, pada 1 Maret 2017 oleh Menteri Keadilan dan Pembangunan Masyarakat, Hon. Ronald K Warsai, dengan menyatakan adanya kekerasan yang terjadi di Papua dalam bentuk diskriminasi hingga pembunuhan (The Republic of Vanuatu Statement delivered by the Hon. RONALD K WARSAL (MP), 2017). Indonesia menggunakan hak jawab untuk menyikapi pernyataan Vanuatu tersebut, bahwa Vanuatu telah melanggar komitmen untuk menghormati kedaulatan negara lain dalam hal ini Indonesia terkait Papua dan Indonesia siap untuk bekerja sama dan berdialog dengan Vanuatu dalam menjawab tuduhan Vanuatu tersebut (34th Session of Human Rights Council Right of Reply (RoR) by the Delegation of the Republic of Indonesia, 2017). Dalam sidang *Human Rights Council* ke-39, pada 19 September 2018, Vanuatu menyampaikan pelanggaran hak asasi manusia serta adanya penghilangan paksa dan penahanan sewenang-wenang (ULMWP, 2018). Pada 17 September 2019 Vanuatu dan Kepulauan Solomon dalam sidang *Human Rights Council* ke-42, menyampaikan isu pelanggaran hak asasi manusia yang dialami masyarakat Papua oleh aparat keamanan Indonesia dan meminta UNHRC untuk melakukan investigasi (RNZ, 2019). Isu kemerdekaan Papua menjadi isu yang seksi di negara ini, baik elit politik hingga masyarakat umum. *Melanesian Connection* adalah hubungan etnis yang erat antara masyarakat, dalam hal ini adalah keterikatan antara masyarakat Vanuatu dengan Papua sebagai etnis Melanesia.

### **2.2.2 Kepulauan Solomon**

Kepulauan Solomon merupakan negara di kawasan Pasifik Selatan yang terletak di bagian timur dari negara Papua Nugini. Negara ini merupakan negara kepulauan dengan memiliki 992 pulau dengan enam pulau utama yang secara keseluruhan memiliki luas wilayah 28.466 kilometer persegi. Populasi masyarakat di Kepulauan Solomon sejumlah 561.000 jiwa yang dihitung dari tahun 2013 dengan mayoritas penduduk adalah ras Melanesia. Kepulauan

Solomon merdeka pada 7 Juli 1978 yang sebelumnya berada di bawah kolonial Inggris. Saat ini Kepulauan Solomon merupakan anggota ke-37 Persemakmuran Inggris, hal tersebut mempengaruhi politik domestik serta sistem pemerintahan. Dengan menganut Monarki Konstitusional, Ratu Elizabeth II menjadi kepala negara yang diwakili oleh Gubernur Jenderal yang merupakan masyarakat asli Kepulauan Solomon. Sistem pemerintahan negara ini menganut Demokrasi Parlementer dengan badan legislatif parlementer yang bersifat unikameral. Perdana Menteri menjadi kepala pemerintahan yang dipilih oleh parlemen. Sistem seperti prosedur hukum dan parlementer didasarkan pada model yang dilakukan Inggris.

Kepulauan Solomon dalam mendapatkan kemerdekaannya banyak mengambil inspirasi dari gagasan *Melanesian Way*. Gagasan tersebut menyadarkan Kepulauan Solomon untuk berdiri sendiri dan terbebas dari kependudukan kolonial. Selain itu negara ini mendorong negara-negara di kawasan Pasifik Selatan untuk terbebas dari kolonialisme melalui organisasi MSG. Dalam organisasi tersebut Kepulauan Solomon menekankan untuk tetap membantu masyarakat Melanesia yang masih belum mendapatkan kemerdekaannya, salah satunya adalah Papua. Kepulauan Solomon mendukung kemerdekaan Papua yang tercermin dari kebijakan-kebijakan yang dibentuk dengan bertujuan mendukung kemerdekaan Papua. Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare merupakan Perdana Menteri yang mendukung penuh Papua untuk mendapatkan kemerdekaannya dari Indonesia, seperti halnya pemerintah dalam mendukung kemerdekaan Kaledonia Baru dan Taiwan. Pemerintah Kepulauan Solomon akan selalu mendukung kemerdekaan Papua Barat sekalipun negara-negara lain tidak lagi mendukung dan akan tetap berdiri di samping Papua Barat, saudara Melanesia mereka (Star, 2017). Hal serupa juga disampaikan oleh pemimpin oposisi, Matthew Wale, bahwa Perdana Menteri harus selalu mendukung kemerdekaan Papua seperti yang dilakukan oleh Vanuatu serta senantiasa menekan pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua (Star, 2019). Simak pernyataannya sebagai berikut :

“Just like Vanuatu, the struggles of the people of West Papua is one quite close to our hearts as Melanesians hence Solomon Islands cannot turn a blind eye to cries on human rights violation and their struggles for self-determination, .... the Prime Minister must know that what is really at stake is the cry of West Papuans to be given the right to rule themselves and the excessive use of force to suppress their cries”

Melalui forum internasional, Kepulauan Solomon mengangkat isu di Papua sebagai dukungan untuk kemerdekaan Papua. Pada 1 Oktober 2015, Perdana Menteri Manasseh Sogavare mengangkat isu Papua di UNGA ke-70. Pemerintah Kepulauan Solomon menyampaikan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua dan meminta

UNHRC untuk melakukan investigasi terkait pelanggaran hak asasi manusia yang dialami masyarakat Melanesia (Solomon Islands for The United Nations, 2015). Kemudian pada UNGA ke-71, Kepulauan Solomon kembali mengangkat isu Papua, melalui Perdana Menteri Manasseh Sogovare menyampaikan pernyataan (RNZ, 2016) :

“Human rights violations in West Papua and the pursuit for self-determination of West Papua are two sides of the same coin, Many reports on human rights violations in West Papua emphasise the inherent corroboration between the right to self-determination that results in direct violations of human rights by Indonesia in its attempts to smother any form opposition.”

Pernyataan tersebut menunjukkan sikap Kepulauan Solomon yang mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia, hal itu disampaikan bahwasanya pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat Papua makin meyakinkan bahwa masyarakat Papua memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Pada 22 September 2017, melalui UNGA ke-72, Perdana Menteri Manasseh Sogavare kembali mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat Papua serta mendorong pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan melalui dialog yang membangun bersama dengan masyarakat Papua (Solomon Islands - Prime Minister Addresses General Debate, 72nd Session, 2017). Indonesia menyikapi menggunakan hak jawab melalui Sekretaris III Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB, Ainan Nuran, yang menyatakan bahwa Papua dan Papua Barat adalah bagian dari kesatuan dan kedaulatan Indonesia, negara-negara itu (Kepulauan Solomon) sudah tertipu oleh individu yang membawa agenda separatis yang mengeksploitasi isu hak asasi manusia (Indonesia - 1st Right of Reply, 2017).

Selain melalui forum UNGA, Kepulauan Solomon menyatakan sikap dukungan terhadap kemerdekaan Papua melalui forum UNHRC dengan menyuarakan isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Dalam sidang UNHRC ke-31, Kepulauan Solomon menyampaikan rasa prihatin atas laporan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat Papua berupa kasus penangkapan yang sewenang-wenang, penyiksaan, membatasi kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh pihak keamanan dari Indonesia (General Debate - 39th Meeting, 31st Regular Session Human Rights Council, 2016). Hal yang sama kembali dilakukan pada sidang UNHRC ke-36, Kepulauan Solomon mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer dan kepolisian Indonesia terhadap masyarakat Papua (General Debate (Cont'd) - 18th Meeting, 36th Regular Session Human Rights Council, 2017).

### **2.2.3 Kaledonia Baru**

Kaledonia Baru merupakan wilayah luar negeri yang dimiliki oleh Perancis yang terletak di kawasan Pasifik Selatan. Hingga saat ini Kaledonia Baru masih menjadi bagian dari Perancis dan sedang dalam proses dekolonisasi untuk mendapatkan kemerdekaan. Dengan memiliki luas wilayah 18.576 kilometer persegi, Kaledonia Baru memiliki jumlah penduduk sebanyak 271.407 jiwa yang terhitung dari tahun 2019. Mayoritas penduduk merupakan masyarakat Kanak yang merupakan masyarakat asli Melanesia dengan jumlah penduduk 111.860 orang atau 41,2% dari total populasi di Kaledonia Baru (Rivoilan, 2019). Pada tahun 1980 terjadi konflik antara masyarakat pro-kemerdekaan Kanak dengan masyarakat pro-loyalis Perancis, yang kemudian konflik diakhiri dengan disepakatinya Perjanjian *Matignon-Oudinot Accords* tahun 1988 sebagai upaya perdamaian dan berlangsung selama 10 tahun. Perjanjian tersebut tidak cukup membuat masyarakat Kanak puas dan menuntut untuk dilaksanakan kembali referendum. Pada tahun 1998 disepakati Perjanjian *Noumea Accord* yang berisikan dijaminnya hak pemerintah sendiri (*sui generis collectivity* yang tercantum dalam Pasal 77 Konstitusi Prancis), pembagian kedaulatan Pusat-Wilayah serta pembentukan lembaga pemerintahan, dan adanya peralihan kekuasaan dalam waktu 20 tahun ke depan melalui referendum (Francaise, 1998). Referendum pertama dilaksanakan pada tahun 2018 dengan hasil 56,7% masyarakat memilih tetap menjadi bagian Prancis, kemudian referendum kedua dilaksanakan pada tahun 2020 dengan hasil 53,26% masyarakat tetap memilih menjadi bagian dari Prancis (BBC, 2020). Referendum ketiga akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Dalam sistem pemerintahan, Kaledonia Baru memiliki hak untuk pemerintah sendiri namun masih di bawah kendali pemerintah Perancis melalui Komisaris Tinggi yang ditunjuk langsung oleh Presiden Perancis. Kaledonia Baru menganut sistem demokrasi representatif yang dipimpin oleh Presiden yang merupakan masyarakat asli Kaledonia Baru. Pemerintahan Kaledonia Baru menganut sistem parlementer yang dilaksanakan oleh kongres, dengan terdiri dari 54 anggota yang bekerja dalam periode lima tahun. Kongres memiliki tugas untuk menunjuk dan memilih Presiden beserta Wakil Presiden serta memiliki wewenang dalam bagian perpajakan, hukum perburuhan, kesehatan, dan perdagangan luar negeri. Pemerintah Perancis memiliki wewenang dalam bagian militer, kebijakan luar negeri, imigrasi, kepolisian, dan mata uang (Francaise, 1998).

Kongres Kaledonia Baru didominasi oleh dua partai yakni partai pro-kemerdekaan dan partai loyalis-Perancis. FLNKS adalah salah satu partai pro kemerdekaan yang berada di Kongres. FLNKS dibentuk pada tahun 1984 dengan beranggotakan masyarakat Kanak yang memperjuangkan kemerdekaan bagi Kaledonia Baru. Negara-negara seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon mendukung FLNKS untuk mencapai kemerdekaannya. Pada 1989,

FLNKS bergabung dalam organisasi MSG, hal tersebut menjadi fenomena unik mengingat FLNKS merupakan sebuah kelompok atau partai yang bergabung dalam sebuah organisasi internasional. Dalam keanggotaannya di MSG, FLNKS memiliki keanggotaan penuh yang sama dengan negara berdaulat lainnya, hal tersebut dinyatakan dengan FLNKS menjadi ketua MSG pada periode tahun 2014 oleh Victor Tutugoro. Selain mendapat kemerdekaan melalui referendum, masyarakat Kanak yang tergabung dalam FLNKS mencoba mendapat dukungan dari dunia internasional. Salah satu cara untuk mendapat dukungan internasional adalah dengan bergabung dalam organisasi regional. *Pacific Island Forum* (PIF) yang merupakan organisasi regional penghimpun negara-negara di kawasan Pasifik, namun PIF menolak keanggotaan FLNKS dikarenakan hanya negara merdeka yang dapat menjadi anggota. Keanggotaan FLNKS menjadi sesuatu yang tidak biasa dikarenakan statusnya sebagai aktor *non-states* namun dapat menjadi anggota dari organisasi regional. Diterimanya FLNKS sebagai wujud bahwa negara - negara Melanesia yang baru merdeka bersatu dalam semangat solidaritas etnis dan budaya dengan komitmen yang jelas untuk memastikan pembebasan saudara mereka yakni masyarakat Kanak atau Kanaky (Interpreter, 2014).

Sebagai organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan, FLNKS turut mendukung kemerdekaan Papua. FLNKS mengutuk kekerasan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui tentara dan kepolisian terhadap masyarakat Papua. Hak penentuan nasib sendiri layak didapatkan bagi masyarakat Papua, serta mendukung upaya dialog antara Indonesia dengan PIF dan *UN Human Rights Commission* (Report, 2019). Begitu juga sebaliknya, masyarakat Papua mendukung penuh Kaledonia Baru untuk mendapatkan kemerdekaannya. Victor Yeimo selaku juru bicara KNPB, menyatakan dukungannya terhadap masyarakat Kaledonia Baru untuk merdeka dikarenakan mendapatkan kesempatan melalui referendum yang dilaksanakan, di mana hal tersebut tidak dapat diperoleh oleh masyarakat Papua (RNZ, 2018). Namun dukungan FLNKS terhadap kemerdekaan Papua tidak akan berarti, sebab kebijakan luar negeri Kaledonia Baru masih berada di bawah oleh pemerintah Perancis. Hal itu ditegaskan oleh Konsul Jenderal RI untuk Kaledonia Baru, Hendra Satya Pramana (2021), Segala bentuk dukungan FLNKS melalui forum MSG terhadap kemerdekaan Papua bukan merupakan sikap dari pemerintah Kaledonia Baru.

#### **2.2.4 Fiji**

Fiji merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan Pasifik Selatan dan berdekatan dengan Tuvalu di sebelah timur. Dengan memiliki luas wilayah 18.300 kilometer persegi, Fiji memiliki 500 pulau dengan total populasi 920 ribu jiwa yang terhitung sejak tahun 2018. Mayoritas penduduk negara ini adalah Fijians yang merupakan masyarakat asli Fiji dan

memiliki ras Melanesia. Pada 10 Oktober 1970, Fiji meraih kemerdekaannya setelah sebelumnya berada di bawah kolonial Inggris dan menjadi negara Persemakmuran Inggris. Dalam masa pemerintahannya, terdapat kudeta yang dilakukan oleh pemerintah militer pada tahun 1987 yang membuat terbentuknya Republik Fiji. Kudeta kembali dilakukan pada tahun 2000 dan 2006 dengan motif adanya ketimpangan kekuasaan dimana komunitas Indo-Fiji yang merupakan imigran dari India mendominasi pemerintahan Fiji saat itu (Premdas, 1992, p. 139). Hingga pada tahun 2013, Fiji menganut demokrasi parlementer dengan parlemen yang bersifat bikameral dengan beranggotakan dewan-dewan dari berbagai macam etnis yang dibagi secara merata baik antara masyarakat Fiji dengan masyarakat Fiji keturunan India dan etnis lainnya. Fiji dipimpin oleh seorang Presiden sebagai kepala negara yang ditunjuk oleh Dewan Kepala Agung atau *Bose Levu Vakaturaga* yang terdiri dari kepala-kepala klan etnis Fiji. Sedangkan Perdana Menteri menjadi kepala pemerintahan yang ditunjuk oleh Parlemen.

Fiji memiliki politik domestik yang diwarnai dengan pelanggaran HAM akibat kudeta pemerintah militer yang dilakukan sejumlah tiga kali. Perdana Menteri Fiji saat ini, Josaia Voreqe Bainimarama atau sering disebut Frank Bainirama, merupakan komandan militer yang memimpin kudeta pada tahun 2006. Dengan kudeta yang terjadi, Australia dan Selandia Baru menerapkan embargo terhadap barang-barang dari Fiji dan menghentikan bantuan luar negeri saat kudeta pertama. Selain itu Fiji dikeluarkan dari keanggotaan PIF, namun masih tetap menjadi keanggotaan dalam MSG (May, 2011, p. 3). Hal tersebut mempengaruhi kebijakan luar negeri Fiji, yakni dengan diciptakan tiga strategi atau kebijakan yaitu *Pacific engagement and leadership*, *look north policy*, dan *friends to all* (Komai, 2015, pp. 112-119). Dengan kebijakan luar negeri tersebut Fiji berusaha untuk memperbaiki citra di dunia internasional, dengan mendekati diri terhadap negara-negara Pasifik, menjalin kerja sama dengan berbagai negara, hingga mulai berpaling dari Australia dan Selandia Baru. Kebijakan tersebut turut mempengaruhi sikap Fiji sebagai negara di kawasan Pasifik Selatan terhadap kemerdekaan Papua.

Tidak seperti negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, Fiji menjadi salah satu negara yang tidak ikut menyuarakan isu kemerdekaan Papua. Fiji menjadi negara Melanesia pertama yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia yang secara resmi pada tahun 1974. Hubungan Fiji dengan Indonesia sangat erat di berbagai bidang baik politik, ekonomi, hingga sosial budaya. Dengan kebijakan luar negeri "*look north*" dan "*friends to all*", Fiji menjadikan Indonesia sebagai partner perdagangan dan jembatan untuk menuju Asia Tenggara (Komai, 2015, pp. 112-119). Pada 27 Mei 2011, Indonesia dan Fiji menandatangani *Development Cooperation Agreement* (DCA) yang mencakup berbagai sektor antara lain pertanian,

perikanan dan sumber daya kelautan, kehutanan, perdagangan dan investasi, pendidikan, hukum dan peradilan, pertahanan, polisi, dan pariwisata dengan nilai ekonomi sekitar 35 juta USD (Fijiembajak, 2012). Tidak lama berselang, Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama, mendorong keanggotaan Indonesia di MSG untuk menjadi *observer member* hingga menjadi *associate member*, hal itu merupakan bentuk kebijakan Fiji yang didorong oleh kepentingan ekonomi dibanding kewajiban moral. (Kabutaulaka, 2015). Dalam keanggotaannya di MSG, Fiji berperan dalam menghalau isu kemerdekaan Papua dalam forum-forum MSG yang dinyatakan langsung oleh Frank Bainimarama sebagai berikut (Kabutaulaka, 2015):

“Papua comes under the governance of Indonesia and if you want to do anything in Papua, the best thing to do is to bring in Indonesia, no matter what, if we bring in Papua separately, it doesn’t make sense”

Fiji mulai memperkuat hubungan-hubungan dengan negara di kawasan salah satunya adalah kawasan Pasifik Selatan. Setelah sebelumnya Fiji dikeluarkan dari keanggotaan PIF dan negara-negara persemakmuran Inggris, Fiji mulai memberlakukan kebijakan luar negeri “*Pacific engagement and leadership*”. Hal tersebut termanifestasi dengan dibuatnya organisasi tandingan, *Pacific Islands Development Forum* (PIDF), yang bertujuan untuk meningkatkan kembali pengaruh Fiji dalam kawasan regional. Selain itu Fiji memperkuat pengaruhnya dalam organisasi MSG. Pada Tahun 1993, MSG membentuk *Trade Agreement “One”* (MSGTA1) yang merupakan sebuah perjanjian dagang yang diprakasai oleh tiga negara anggota MSG pada saat itu yakni Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. MSGTA1 merupakan perjanjian perdagangan bebas yang bersifat timbal balik dengan fokus pada barang. Pada tahun 1996, Fiji resmi menjadi anggota MSG dan turut bergabung dalam MSGTA1 pada tahun 1998. Keanggotaan Fiji dalam MSG dikarenakan adanya keuntungan potensial bagi Fiji dengan tergabung dalam perjanjian perdagangan antara negara anggota MSG (Kabutaulaka, 2015). Dapat dikatakan Fiji ikut bergabung dengan MSG didasari oleh kepentingan ekonomi yang berupa perluasan pasar yang membuat komoditas Fiji dapat merambah di kawasan regional, dibanding dengan kepentingan hak asasi manusia dan *self-determination* yang selama ini digaungkan oleh MSG.

Dalam isu kemerdekaan Papua, Fiji mendukung kedaulatan penuh Indonesia atas Papua dan menyatakan bahwa Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia. Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama mengatakan (DW, 2018) : “Kedaulatan Indonesia atas Papua Barat tidak bisa diganggu gugat”. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengundang Menteri Luar Negeri Fiji, Ratu Inoke Kubuabola, untuk berdialog terkait isu kemerdekaan Papua yang digaungkan oleh MSG.

Pemerintah Fiji melalui Ratu Inoke Kubuabola menyatakan Indonesia dan Papua adalah bagian tak terpisahkan dan integritas tersebut telah diakui oleh PBB (Kumbaran, 2019). Namun sikap pemerintah Fiji terhadap isu kemerdekaan Papua dan relasi dekatnya dengan Indonesia, menuai kritik dari pemimpin partai oposisi, Anare Jale. Anare menyatakan bahwa Fiji masih menutup mata atas pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat Papua dan mendesak Komisi Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran yang terjadi (RNZ, 2019).

### **2.2.5 Papua Nugini**

Papua Nugini merupakan negara di kawasan Pasifik Selatan yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Indonesia. Negara yang memiliki luas wilayah 462.840 kilometer persegi tersebut memiliki populasi penduduk sejumlah 8 juta penduduk yang terhitung sejak tahun 2020. Mayoritas penduduk di Papua Nugini merupakan masyarakat asli ras Melanesia. Papua Nugini merdeka pada 16 September 1975 setelah berada di bawah pengaruh pemerintah Australia. Setelah sebelumnya berada di bawah kependudukan Australia, membuat sistem pemerintah Papua Nugini banyak dipengaruhi oleh Australia. Papua Nugini menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional dengan Ratu Elizabeth ke II menjadi kepala negara dan Gubernur Jendral menjadi perwakilan pemerintah Inggris negara Papua Nugini. Dalam menjalankan pemerintahan, Perdana Menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan yang ditunjuk oleh Parlemen.

Kemerdekaan Papua Nugini adalah wujud manifestasi dari semangat *Melanesian Way* yang digagas oleh filsuf Bernard Narokobi yang berkebangsaan Papua Nugini. Narokobi menyatakan bahwa bangsa Melanesia harus berdiri sendiri di atas tanahnya jauh sebelum bangsa Eropa datang (Narokobi, 1980, pp. 3-5). Bangsa Melanesia terkhusus Papua Nugini harus mampu memimpin dan mengatur daerah mereka sendiri tanpa adanya campur tangan bangsa lain. Kemerdekaan menjadi sesuatu yang diperjuangkan oleh Narokobi. Sebagai negara yang mencetuskan ide besar terkait Melanesia tidak serta merta menjadikan Papua Nugini mendukung isu kemerdekaan Papua Barat.

Sikap Papua Nugini terhadap isu kemerdekaan Papua terhambat oleh permasalahan dalam negeri di mana terdapat usaha-usaha kemerdekaan yang dilakukan oleh masyarakat Bouganville dari Papua Nugini. Daerah Bouganville terletak 900 kilometer dari Papua Nugini dan berbatasan dengan Kepulauan Solomon, dengan letak geografis tersebut menjadi salah satu faktor kemerdekaan ingin diraih oleh masyarakat Bouganville (Woodbury, 2015, pp. 1-19). Dengan menjadi daerah terluar dari Papua Nugini, masyarakat Bouganville menginginkan untuk memisahkan diri dari Papua Nugini, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan

melalui aksi protes yang kemudian berujung dengan kekerasan. Pemimpin kelompok pemberontak, *Bougainville Revolutionary Army* (BRA), Francis Ona, mendeklarasikan kemerdekaan Bougainville dalam sebuah negara Republik Me'ekamui (Woodbury, 2015, pp. 1-19). Menyikapi hal tersebut *Papua New Guinea Defence Force* (PNGDF) melakukan pertahanan terhadap daerah-daerah namun dengan adanya disiplin yang rendah PNGDF menyerang hingga membunuh masyarakat sipil Bougainville. Hal tersebut menjadikan Papua Nugini memiliki permasalahan HAM atas masyarakat Bougainville. Dengan demikian membuat Papua Nugini dilema untuk mendukung isu kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia.

Kasus pelanggaran HAM terhadap masyarakat Bougainville, membuat negara-negara seperti Australia dan Selandia Baru menerapkan sanksi-sanksi ekonomi. Papua Nugini mulai mengalihkan pandangannya terhadap negara-negara barat dan mulai mencari dukungan lewat negara-negara di Asia Tenggara. Dalam kebijakan '*look north*', Papua Nugini berusaha untuk mendapat keanggotaan organisasi regional di Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dapat menjadi jembatan untuk mendapatkan akses baik ekonomi dan sosial budaya. Indonesia merupakan penghubung Papua Nugini dengan kawasan Asia Tenggara dan merupakan anggota terkemuka di *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) (MacQueen, 2007, p.168). Papua Nugini berusaha untuk bersikap kooperatif dengan Indonesia agar tercapainya kepentingan nasional dengan menjadi anggota dari ASEAN. Sikap kooperatif dibuktikan dengan Papua Nugini membantu Indonesia untuk menangkap pasukan OPM yang melarikan diri ke wilayah Papua Nugini. Pada tahun 1978 Papua Nugini bersama Indonesia melaksanakan operasi gabungan untuk menumpas pasukan OPM di perbatasan dan menangkap pemimpin OPM, Seth Rumkorem dan Jacob Prai (Usman, 1989, p.56). Sikap kooperatif tersebut menunjukkan bahwa Papua Nugini mendukung kedaulatan Indonesia atas Papua.

Walaupun hubungan Papua Nugini dengan Indonesia berjalan dengan baik, hal tersebut tidak memungkiri dukungan Papua Nugini terhadap pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua. Papua Nugini tidak mendukung kemerdekaan Papua melainkan menyuarakan isu pelanggaran yang terjadi. Pada tahun 2015, dalam KTT MSG, Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill, menyuarakan untuk negara-negara Melanesia turut membantu masyarakat Papua dengan pelanggaran HAM yang terjadi (ABC, 2015). Hal tersebut disampaikan sebagai pengingat bahwa sebagai sesama saudara Melanesia, sudah sepatutnya untuk membantu saudara yang sedang mengalami krisis terutama kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

### 2.3 Pacific Elevation

Indonesia sebagai negara dengan memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya terkhusus wilayah Papua, melakukan usaha-usaha untuk mendekatkan diri dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Negara-negara di kawasan Pasifik Selatan tersebut memiliki kesamaan ras dengan masyarakat Papua yakni ras Melanesia, hal tersebut yang kemudian mendorong mereka untuk mendukung Papua dan menyuarakan isu kemerdekaan Papua. Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Kaledonia Baru menjadi negara yang paling gencar menyuarakan isu kemerdekaan Papua di berbagai forum baik regional maupun internasional. Fiji dan Papua Nugini menjadi negara yang mendukung kedaulatan penuh Indonesia atas wilayah Papua dan tidak ikut campur dalam permasalahan yang terjadi di Papua. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menyatakan bahwa semua negara memiliki hak untuk bebas berpendapat terutama dalam forum internasional seperti PBB, namun Indonesia tidak akan bersedia untuk membahas isu tentang penentuan hak sendiri, kemerdekaan, dan separatisme (BBC, 2017). Indonesia berupaya keras untuk mendekatkan diri terhadap lima negara tersebut untuk mengubah persepsi serta meneguhkan posisi Indonesia sebagai bagian dari Pasifik dengan tujuan untuk menghormati kedaulatan Indonesia atas wilayah Papua.

Usaha Indonesia dalam mendekatkan diri dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan mulai mengalami peningkatan di bawah pemerintahan Joko Widodo. Pada era pemerintahan sebelumnya, Indonesia telah memfokuskan kawasan Pasifik Selatan menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia. Pada era pemerintahan Soeharto, Indonesia menganggap penting Pasifik Selatan dan menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia dengan tercantum dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978, 1983, dan 1988 (TAP MPR No. II/1988). Selain itu, Indonesia mulai menjalin hubungan diplomatik dengan beberapa negara di Pasifik Selatan, antara lain tahun 1974 dengan Fiji, tahun 1975 dengan Papua Nugini, tahun 1983 dengan Kepulauan Solomon dan Kaledonia Baru, tahun 1995 dengan Vanuatu. Pada tahun 1981, Soeharto juga menawarkan bantuan dalam kerangka kerja sama teknik antar negara berkembang (KTNB) atau *Technical Corporation Amongst Developing Countries* kepada negara-negara di kawasan Pasifik khususnya Pasifik Selatan. Pada tahun 1982, Indonesia memberikan bantuan kepada Fiji berupa pelatihan dan pendidikan di bidang pertanian, peternakan, konstruksi, dan media dalam rangka KTNB. Pada era pemerintahan B.J. Habibie, Indonesia tidak memiliki politik luar negeri yang signifikan khususnya terhadap kawasan Pasifik Selatan dikarenakan pada pemerintahan Habibie terjadi transisi dan proses demokratisasi ditambah dengan kondisi dalam negeri yang belum stabil.

Pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Indonesia mulai memfokuskan politik luar negeri di kawasan Pasifik Selatan namun melalui forum informal untuk melawan kampanye yang digaungkan OPM di antara negara-negara Pasifik khususnya Vanuatu (Purba, 2002). Hal tersebut termanifestasi dengan dibentuknya forum dialog *West Pacific Forum* (WPF) yang kemudian berganti nama menjadi *Southwest Pacific Dialogue* (SWPD), forum tersebut terdiri dari Australia, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, Selandia Baru, dan Timor Leste guna bertukar pandangan dan informasi terkait isu di kawasan. *Southwest Pacific Dialogue* bagi Indonesia menjadi upaya untuk meredam separatisme dan membangun citra masyarakat yang pluralis yang disegani dari suku, budaya, dan agama (Santarita, 2002, p.130). Forum ini menjadi wujud kebijakan luar negeri Indonesia berdasar prinsip *good neighbour policy* terhadap kawasan Pasifik khususnya Pasifik Selatan. Selain itu pada pemerintah Gus Dur, Indonesia aktif dalam organisasi di Pasifik yaitu PIF. Hal tersebut disebabkan saat pertemuan SPF ke-30 (masih dengan nama *South Pacific Forum*) tahun 1999 di Palau, PIF untuk pertama kalinya menyuarakan isu yang terjadi di Papua dalam forum. Indonesia kemudian aktif dalam organisasi tersebut dan menjadi mitra wicara/dialog pada tahun 2001 dalam PIF untuk meluruskan informasi-informasi yang berkaitan dengan Papua (Jaya, 2010, pp.111-119).

Pada era pemerintahan Megawati Soekarno Putri, Indonesia menerapkan kebijakan *Look East Policy* dengan memprioritaskan kawasan Pasifik dalam politik luar negerinya. Hal itu termanifestasi dengan Indonesia aktif melalui dua forum Pasifik yakni PIF dan SWPD. Dalam PIF, Indonesia melakukan berbagai macam kerjasama salah satunya pelatihan kredit mikro (*micro finance*) dengan Kepulauan Marshall, Vanuatu, dan Tonga. Aktifnya Indonesia di PIF dikarenakan negara-negara anggota PIF menyinggung masalah yang terjadi di Papua dan membahas dalam forum di beberapa pertemuan PIF, antara lain pertemuan PIF ke-31 tahun 2000 di Kiribati, PIF ke-32 tahun 2001 di Nauru, PIF ke-33 tahun 2002 di Fiji, PIF ke-34 tahun 2003 di Selandia Baru, PIF ke-37 tahun 2006 di Fiji, PIF ke-38 tahun 2007 di Tonga. Melalui PIF Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan dan penggalangan agar forum tidak mengangkat masalah Papua (Jaya, 2010, pp.111-119). Selain itu, Megawati mulai meningkatkan pelaksanaan SWPD, pada tahun 2003 Indonesia memberikan program beasiswa kebudayaan khususnya kebudayaan Jawa, Sunda, dan Bali kepada negara anggota SWPD dan kepada Fiji pada tahun 2004.

Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kebijakan luar negeri terhadap kawasan Pasifik Selatan masih melanjutkan era presiden sebelumnya dengan meningkatkan kebijakan *look east policy*, selain itu dalam pemerintahan SBY menganut

kebijakan luar negeri yang disebut *A million friends and zero enemy*. Pada tahun 2005, Program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia merambah ke 48 peserta dari negara ASEAN+3 (China, Korea Selatan, Jepang), SWPD, PIF. Program tersebut juga memperkenalkan budaya Papua kepada peserta dan kerjasama kebudayaan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa saling pengertian dan saling menghormati diantara negara-negara anggota (Jaya, 2010, pp.111-119). Selain itu Indonesia juga mendekatkan diri terhadap MSG dan menjadi observer member pada KTT MSG ke-18 tahun 2011. Pemerintah juga menyelenggarakan *Bali Democracy Forum* (BDF) pada tahun 2008 yang bertujuan mempromosikan dan membina kerjasama regional dan internasional di bidang perdamaian dan demokrasi melalui dialog (Kemlu, 2008). Negara Pasifik Selatan ikut serta dalam beberapa kali perhelatan BDF antara lain Vanuatu, Papua Nugini, Fiji, dan Kepulauan Solomon.

Indonesia merupakan wilayah terbesar di kawasan Pasifik Selatan melalui lima wilayah provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat dengan total penduduk sejumlah 13 juta jiwa atau 40% dari total penduduk merupakan ras Melanesia (Kemlu, 2020). Fakta tersebut tidak banyak diketahui oleh masyarakat di Pasifik akibat minimnya informasi terkait Indonesia. Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa, Tonga, Kepulauan Cook, dan Niue, Tantowi Yahya (2021), menyampaikan bahwa Indonesia memiliki *image* yang tidak baik di mata masyarakat Pasifik dan belum banyak yang mengetahui bahwa Indonesia merupakan bagian dari Pasifik, hal itu disebabkan adanya jarak dan faktor opsi transportasi yang minim sehingga membuat kurangnya interaksi antara masyarakat Indonesia dan Pasifik. Hal-hal tersebut membuat Indonesia perlu menegaskan posisinya di kawasan Pasifik Selatan serta meningkatkan keterikatan antar negara-negara.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, membuat sebuah strategi untuk meningkatkan keterikatan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dengan Indonesia. Strategi Indonesia di kawasan Pasifik Selatan berada di bawah satu payung strategi besar yang disebut *Pacific Elevation*. Secara konseptual *Pacific Elevation* adalah komitmen Indonesia untuk membantu negara atau teritori Pasifik melalui berbagai bentuk kerja sama bilateral dan *regional* serta adanya bantuan langsung (Kemlu, 2020). Konsep tersebut pertama kali disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dalam acara *Pacific Exposition* yang merupakan forum Pasifik pertama kali dilakukan atas prakarsa Indonesia. Dilaksanakan pada 11-14 Juli 2019 di Selandia Baru, *Pacific Exposition* bertujuan untuk mempercepat peningkatan kerja sama kawasan di bidang ekonomi, pariwisata, dan budaya (Kemlu, 2019). Selain itu menurut Tantowi Yahya, ada empat capaian Indonesia dalam acara tersebut antara lain rekognisi negara-negara Pasifik terhadap Indonesia, membuka akses

provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia, memasukan Indonesia ke peta pariwisata Pasifik, serta membuka pasar non-tradisional (News, 2019). Acara tersebut merupakan hasil kerja sama Indonesia dengan Australia dan Selandia Baru dengan dihadiri oleh 19 negara di kawasan Pasifik Selatan, antara lain adalah Kepulauan Cook, Micronesia, Fiji, French Polynesia, Kiribati, Kepulauan Marshall, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Kepulauan Solomon, Timor Leste, Tuvalu, Vanuatu, dan Kaledonia Baru. Turut hadir Perdana Menteri Kepulauan Cook, Henry Puna, Perdana Menteri Niue, Toke Tufukia Talag, Wakil Perdana Menteri Tonga, Semisi Lafu Kioa Sika, Menteri Pariwisata Selandia Baru, Kelvin Davis, Menteri Pembangunan Maori, Nanaia Mahuta, Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi Samoa, Rico Tupai, Pejabat Perencanaan Ekonomi Utama, Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Fiji, Virisila Tuimanu. Selain itu 123 perusahaan menghadiri acara tersebut yang terdiri dari perusahaan BUMN Indonesia serta perusahaan-perusahaan dari negara pasifik. Acara ini terbuka oleh masyarakat umum dan gratis.

Dengan tema “Creating Pacific Momentum”, acara tersebut mampu menghasilkan total transaksi bisnis sekitar NZD 104 juta (USD 70 juta) dan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Niue dan Kepulauan Cook (Kumparan, 2020). Dengan pencapaian tersebut, Indonesia akan melaksanakan kembali *Pacific Exposition* yang kedua pada 27-30 Oktober 2021 di Christchurch, Selandia Baru. Indonesia ingin membantu percepatan pemulihan ekonomi di kawasan Pasifik melalui adanya forum pariwisata, forum bisnis, forum kesehatan, pameran, serta aktivasi kebudayaan dalam *fashion show* dan festival kuliner (Kemlu, 2021). *Pacific Exposition* menjadi langkah awal kebijakan *Pacific Elevation* dalam upaya mendekatkan diri dan menegaskan posisi di kawasan Pasifik Selatan.

*Pacific Elevation* sebagai sebuah strategi dalam meningkatkan keterikatan dengan negara-negara di kawasan Pasifik selatan berlandaskan dengan karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat Pasifik yakni masyarakat Melanesia. Tantowi Yahya (2021) menyampaikan bahwa terdapat karakteristik yang dimiliki masyarakat Pasifik yakni *Whanau* atau mengutamakan kekeluargaan, prinsip *Manaakitanga* yakni sikap masyarakat yang saling menghormati baik antar sesama dan juga kepada alam, kemudian cinta akan seni budaya yang terlihat dari kebiasaan masyarakat Pasifik yang mencintai musik dan tari-tarian, dan yang terakhir kelembutan hati. Karakteristik masyarakat Pasifik menjadi basis diplomasi Indonesia terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Indonesia memanfaatkan kesamaan budaya diantara negara-negara di Pasifik. Dalam acara *Pacific Exposition*, Indonesia menyelenggarakan *Arts, Music, and Culture Performances* di hari kedua. Dalam acara tersebut terjadi kolaborasi antar musisi dari Nusa Tenggara Timur, Papua, Tonga dan Samoa yang menunjukkan bahwa

kawasan Pasifik memiliki keragaman budaya, sejarah, identitas dan Indonesia merupakan bagian dari sebuah keragaman tersebut (Kemlu, 2019). Konser *Sound of the Pacific* dimeriahkan oleh berbagai penari dan musisi terkenal seperti Glen Fredly, Ivan Nestorman, kelompok musik *Papua Originals* bersama yang merupakan perwakilan dari Indonesia, bersama artis dari kawasan Pasifik seperti Swiss dari Tonga, Mr. Cowboy/ Sam Chookon dari Samoa, Ellaphon dari Selandia Baru, dan Erakah dari Fiji.

Dalam *Pacific Exposition*, Indonesia untuk pertama kali mengadakan forum kebudayaan Pasifik yang disebut *Pacific Cultural Forum* pada 13 Juli 2019 di SkyCity Convention Center, Auckland, Selandia Baru. Dengan mengangkat tema “Our Way Forward: Fostering Cultural Cooperation Among Pacific Nations” forum kebudayaan ini berdiskusi terkait sejarah dan keragaman budaya dan identitas di Pasifik serta berbagi ilmu dan pengetahuan tentang asal muasal budaya Indonesia dan Pasifik dari perspektif akademisi dan pakar (Kemlu, 2019). Forum ini dihadiri oleh peserta dari 19 negara antara lain adalah Australia, Kepulauan Cook, Negara Federasi Micronesia, French Polynesia, Fiji, Kaledonia Baru, Kiribati, Kepulauan Marshall, Nieu, Nauru, Papua Nugini, Palau, Samoa, Selandia Baru, Kepulauan Solomon, Timor-Leste, Tonga, dan Tuvalu. Indonesia diwakili langsung oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, serta terdapat pejabat negara sebagai pembicara antara lain Menteri Komunitas Etnis Selandia Baru, Jenny Selesa, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Papua Nugini, Soroi Marepo, dan Dirjen *Melanesian Spearhead Group*, Amana Yauvoli. Dalam forum ini juga mengangkat isu untuk pengajuan nominasi bersama warisan budaya yang ditetapkan oleh UNESCO, hal tersebut guna mengikat persahabatan antar negara Pasifik sekaligus pengakuan bahwa Indonesia dan Kawasan Pasifik memiliki budaya yang serupa (Kemendikbud, 2019). Tantowi Yahya (2021) menyatakan dalam forum tersebut telah terbentuk suatu konsep *One Pacific Identity* yang akan terus disosialisasikan dalam rangka menjadikannya sebagai basis budaya bangsa-bangsa di Pasifik serta Indonesia ada di dalamnya.

Dalam sektor ekonomi, Indonesia meningkatkan kerja sama ekonomi dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar, negara-negara Pasifik dapat menjadikan Indonesia sebagai pasar untuk menjual komoditas yang mereka miliki. Tantowi Yahya (2021) menyampaikan bahwa apa yang dibutuhkan negara-negara di Pasifik adalah kerja sama ekonomi serta membutuhkan pasar untuk menjual komoditas yang dimiliki. Pada periode Januari-Maret 2019 total perdagangan Indonesia dengan kawasan Pasifik tercatat sebesar USD 2,04 miliar (Kemendag, 2019). Impor Indonesia dari kawasan Pasifik berupa batu bara bitumen, produk peternakan, gandum, konsentrat biji

benih, dan gula mentah. Sebaliknya, Indonesia juga melakukan ekspor ke negara-negara di kawasan Pasifik berupa komponen elektronik, kelapa sawit, ban, dan tembakau. Dengan adanya kebijakan luar negeri *Pacific Elevation*, Indonesia menekankan kegiatan ekspor dan impor khususnya terhadap produk non-migas ke negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yakni pada periode 2019 hingga April 2021, sebagai berikut:

**NERACA PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN NEGARA DI KAWASAN  
PASIFIK SELATAN PERIODE 2019 – APRIL 2021 (RIBU US DOLLAR)**

| Negara            | Ekspor<br>(2019 – April 2021) | Impor<br>(2019 – April 2021) | Total Perdagangan<br>(2019 – April 2021) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| Fiji              | 55.123,9                      | 1.744                        | 56.867,8                                 |
| Papua Nugini      | 349.969,8                     | 103.991,3                    | 453.961,1                                |
| Vanuatu           | 11.086,8                      | 14.897,1                     | 25.984                                   |
| Kepulauan Salomon | 30.324,1                      | 4.032,3                      | 34.356,4                                 |
| Kaledonia Baru    | 29.061,3                      | 199,2                        | 29.260,5                                 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian  
Perdagangan (Kemendag, 2019)

Pada *Pacific Exposition*, Kemendag memfasilitasi 30 perusahaan yang bergerak di sektor makanan dan minuman, elektronik, jasa keuangan, dengan harapan dapat meningkatkan kehadiran dan peran Indonesia sebagai bagian dari wilayah Pasifik, mendorong pasar Pasifik yang terintegrasi, serta memperkenalkan potensi negara-negara di Kawasan Pasifik (Kemendag, 2019). Australia, Selandia Baru, Timor Timur, Papua Nugini, dan Fiji menjadi negara tujuan ekspor Indonesia terbesar di kawasan Pasifik pada periode Januari – Maret 2019.

Dalam periode 2019- 2021, neraca Perdagangan Indonesia dengan Vanuatu menjadi yang terendah dibanding dengan negara di kawasan Pasifik Selatan lainnya, hal itu dikarenakan hubungan Indonesia dengan Vanuatu dalam lima tahun terakhir cenderung berjalan buruk

terutama dimulainya kepemimpinan PM Charlot Salwai pada tahun 2016 dimana pemerintah Vanuatu menunjukkan sikap tidak bersahabat dengan Indonesia (Kemlu, 2021). Pada bulan April 2015, ketika Vanuatu dilanda angin topan PAM dan menghancurkan sekitar 70% kehidupan, Indonesia memberi bantuan senilai USD 2 juta yang meliputi uang USD 450.000, tenaga personil, 1000 paket lauk pauk, 6000 paket makanan tambahan gizi, 6000 paket makanan siap saji, 2000 paket makanan biskuit, 149 dus MP-ASI, 333 dus PMT ibu hamil, 500 paket *kids ware*, 1 paket tenda posko, 1 paket tenda pengungsi, 26 dus solar sel, 200 unit tenda keluarga, 2 unit alas tenda, 20 unit velbed, 2 unit genset, 7500 lembar selimut beserta *polybag*, penjernih air cepat, desinfektan, repelan, sarung tangan, hygiene kit, dan terfaulin (BNPB, 2015). Dengan hubungan bilateral yang tidak baik, Indonesia tetap mendorong pemberian bantuan ekonomi terhadap Vanuatu secara *low profile* guna meningkatkan dan mempertahankan citra positif di negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Pada tahun 2018 dan 2019, pemerintah Indonesia melalui Kemenlu dan Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan *media outreach* melalui program *Journalis Visit Program (JVP)* dengan peserta para media Vanuatu, hal itu bertujuan untuk meningkatkan *exposure* positif tentang Indonesia di Vanuatu dan memperkecil potensi dukungan separatis Papua oleh simpatisan di Vanuatu (Kemlu, 2021). Walaupun demikian, hingga saat ini Vanuatu masih mendukung gerakan separatis Papua baik di regional maupun forum internasional, serta tidak menghormati kedaulatan Indonesia atas Papua, Pemerintah Indonesia mengambil sikap dengan menggunakan *aggressive engagement* terhadap Vanuatu (Kemlu, 2021).

Indonesia juga meningkatkan produktivitas dalam bidang ekonomi khususnya terhadap Kaledonia baru. Pada tahun 2020, volume perdagangan Indonesia dengan Kaledonia Baru mengalami peningkatan sebesar 26,08% dibanding dengan tahun sebelumnya pada tahun 2019 yang mencapai nilai USD 11,56 juta dan pada tahun 2020 mencapai USD 14,58 juta yang hampir seluruhnya didominasi oleh ekspor Indonesia ke Kaledonia Baru (Kemlu, 2021). Ekspor Indonesia ke Kaledonia Baru didominasi oleh komoditi non-migas seperti peralatan industri, mesin, alumunium, kertas, kayu, perabotan, alas kasur, kertas tissue, lampu, pakaian dan aksesoris, alas kaki, peralatan elektronik, tanaman, obat, aromatik, rempah-rempah, produk bahan kue, kopi, teh, dan minuman ringan, dengan nilai ekspor pada tahun 2020 senilai USD 7.849 ribu yang juga mengalami peningkatan sebesar 47,46% dari tahun 2019 yang senilai USD 5.316 ribu. Pada tahun 2019, Indonesia menjadi negara peringkat ke-8 sebagai negara importir bagi Kaledonia Baru (Kemlu, 2021). Barang yang di impor antara lain produk alumunium, plastik, barang konsumsi, dan farmasi.

Dalam meningkatkan engagement terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, Indonesia menggunakan bantuan ekonomi secara langsung. Sebagai bagian Pasifik dan negara besar anggota G20, Indonesia bertanggung jawab untuk ikut membantu negara-negara berupa pemberian bantuan secara langsung atau sering disebut diplomasi “tangan di atas”. Diplomasi tersebut dijalankan oleh Kemenlu dengan mengesahkan terbentuknya Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (PKDPI) atau *Indonesia Agency for International Development* (Indonesia Aid). Pada 18 Oktober 2019, Wakil Presiden Indonesia saat itu, Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani ikut serta dalam peluncuran bantuan ekonomi Indonesia tersebut. Pemerintah Indonesia mengucurkan dana sebesar Rp 3 triliun (USD 212 juta) dari APBN sebagai dana abadi untuk dana bantuan, dana abadi ini berada di bawah Kementerian Keuangan yang berperan sebagai pengelola dana bantuan dengan arah kebijakan yang disusun oleh Kementerian Luar Negeri, sejauh ini telah diberikan kepada lima negara di Kepulauan Pasifik yaitu Tuvalu, Kepulauan Solomon, Fiji, Nauru, dan Kiribati serta Filipina dan Myanmar (Tahalele, 2021). Dana tersebut dialokasikan untuk beberapa sektor seperti perubahan iklim, bantuan kemanusiaan, infrastruktur, pertanian dan perikanan (Bakhtiar & Permana, 2020), namun Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menyatakan bahwa *Indonesia Aid* tidak dibatasi pada sektor tertentu dan Negara yang memerlukan dapat menentukan penggunaan dana untuk sektor yang dibutuhkan asalkan sejalan dengan garis pembangunan Indonesia (Tempo, 2019).

Di lain sisi, Indonesia merupakan negara yang menerima bantuan pembangunan tiap tahunnya oleh Jepang, Australia, Tiongkok, Amerika Serikat, Singapura, dan *World Bank*. Pada periode 2019-2020, Indonesia akan menjadi penerima bantuan terbesar kedua dari anggaran bantuan Australia senilai AUD 4 miliar dan telah menerima AUD 298,5 juta untuk program pendidikan, infrastruktur, pertanian, dan tata kelola, hal tersebut menjadikan Australia sebagai negara donor bantuan terbesar keempat untuk Indonesia (James Massola, 2019). Namun hal tersebut dijelaskan oleh Retno Marsudi dalam meluncurkan program ini yang mengatakan (Kemenkeu, 2019) :

“Indonesia Aid ini adalah perangkat diplomasi yang memperkuat kontribusi dan peran Indonesia di dunia internasional. Melalui Indonesia Aid, Indonesia dapat melakukan *walk the talk* untuk mendorong kemitraan global dalam pembangunan. Indonesia Aid juga akan memperkuat mekanisme kerja sama Selatan-Selatan dan kerjasama triangular. Indonesia Aid ini juga menjadi *tools* bagi kontribusi Indonesia untuk pencapaian SDGs. Prinsip Indonesia sangat jelas bahwa Indonesia ingin terus berkontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia.”

Hal tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk membantu negara-negara dalam bantuan ekonomi langsung untuk bersama-sama dalam membangun sebuah negara melalui *Indonesia Aid*. Pada 5 Desember 2019, *Indonesia Aid* termanifestasi dengan ditandatanganinya perjanjian hibah (Grand Agreement) oleh Menlu Retno Marsudi dan Menlu Kepulauan Solomon Jeremiah Manele di tengah acara BDF ke 12, berupa pembangunan stadion futsal serba guna kepada Kepulauan Solomon guna membantu dalam persiapan menjadi tuan rumah dalam ajang *Pacific Game 2023*, selain itu Indonesia dan Kepulauan Solomon menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Pembangunan (Framework on Development Cooperation) (Kemlu, 2019). Pembangunan stadion futsal serba guna tersebut nantinya dapat digunakan untuk cabang olahraga, seperti futsal, basket, dan voli, serta dapat juga digunakan sebagai tempat menyelenggarakan konferensi hingga acara budaya, stadion senilai Rp 112.5 miliar ini akan dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Wijaya Karya dan diperkirakan akan selesai pada Desember 2022 (SIFF, 2020).

Pada 8 April 2020 Indonesia melalui Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji, Benjamin Scott Carnadi, memberikan hibah berupa bantuan sebesar 7500USD untuk korban angin puting beliung dalam bentuk cek tunai sebesar 5000USD dan 100 paket sembako senilai 2500USD, kepada Direktur Badan Nasional Penanggulangan Bencana Fiji, Inia Seruiratu yang merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan Nasional Fiji (AntaraNews, 2020). Kemudian pada 16 Desember 2020, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menandatangani perjanjian hibah secara virtual dengan Kepulauan Solomon, Fiji, dan Timor Leste, pemberian hibah ini menggunakan dana dari *Indonesia Aid* yang diluncurkan tahun 2019 lalu dan dalam rangkaian kebijakan *Pacific Elevation* terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Indonesia memberikan hibah senilai Rp 29.41 miliar dengan rincian sebesar Rp 2.88 miliar yang diberikan masing-masing kepada tiga negara tersebut untuk digunakan untuk membiayai pengadaan alat-alat kesehatan yang diproduksi oleh Indonesia untuk membantu penanganan pandemi COVID-19 (Arbar, 2020). Selain itu Indonesia juga memberikan tambahan hibah untuk Fiji sebesar Rp 20.77 miliar untuk pembangunan *Queen Victoria School* tahap kedua. Pemberian bantuan ekonomi langsung ini sejalan dengan visi *Pacific Elevation* untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di negara-negara kawasan Pasifik Selatan (Medcom, 2020).

Indonesia berusaha mewujudkan konektivitas antar negara di kawasan Pasifik Selatan melalui sektor Pariwisata. Negara-negara di Pasifik Selatan mayoritas wilayahnya merupakan lautan, hal itu yang menyebabkan banyak pemasukan negara berasal dari sektor pariwisata. Wisata yang paling terkenal adalah kapal pesiar atau *cruise* yang mengitari negara-negara

seperti Fiji dan Vanuatu dengan sekitar 80 persen penumpang kapal pesiar ke negara-negara di Pasifik Selatan berasal dari Australia (TribunNews, 2019). Melalui strategi *Pacific Elevation*, Indonesia berusaha menyatukan dan terlibat dalam sektor pariwisata di kawasan Pasifik Selatan dengan melibatkan lima pulau di Indonesia yang menjadi bagian dari Pasifik, Hal tersebut diwujudkan melalui konsep *One Pacific Destination* oleh Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa, dan Kerajaan Tonga, Tantowi Yahya bahwa Indonesia akan terlibat dalam wisata laut yang dimiliki oleh kawasan Pasifik yakni *cruise* dengan menyertakan pulau-pulau di Indonesia Timur. Tantowi Yahya (2021) memiliki gambaran bahwa nantinya wisata *cruise* akan masuk mulai Port Moreseby, kemudian Australia bagian utara, hingga memasuki wilayah Indonesia Timur terkhususnya Raja Ampat dan memperkenalkan Ambon sebagai “the city of music”. Dengan hal tersebut konsep tersebut Indonesia dapat mengintegrasikan negara-negara di Pasifik menjadi satu kesatuan tempat pariwisata yang terpadu. Melalui konsep ini, Indonesia mampu mendorong sektor pariwisata di negara-negara Pasifik Selatan dan meningkatkan pendapatan dari sektor ini. Tantowi Yahya (2021) menyampaikan strategi ini merupakan *long term* serta dibutuhkan pembaharuan infrastruktur pariwisata oleh Indonesia agar mampu menciptakan kawasan pariwisata yang dapat dinikmati oleh turis mancanegara.